



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 43 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

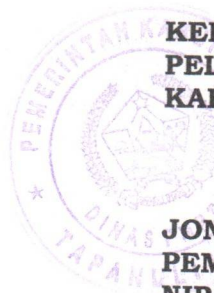
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026

M E M U T U S K A N :

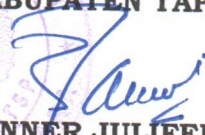
- Menetapkan : **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

- KEDUA : Renja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- KETIGA : Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 2025;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : Oktober 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**


**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 197007182005021001**

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang memuat informasi tentang rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Tarutung, Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	44
Lampiran	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.....	30
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	34
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 maka seluruh perencanaan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus berpedoman kepada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada dokumen tersebut, sehingga tercipta suatu arah pembangunan daerah yang baik dan bersinergis. Selain itu, pengaruh isu-isu global yang sedang terjadi juga sangat berpengaruh bagi perencanaan yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi perkembangan global yang terjadi di suatu daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam waktu kurun satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan.

Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.



Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Renja Tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;



- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 35) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
- 36) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.



Adapun Tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi, dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD tahun-tahun sebelumnya.



- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana kerja awal dengan perbandingan dengan rencana kerja yang dilaksanakan.
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para stake holder, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2024 adalah sebesar 94,30%, dan diharapkan pada tahun 2025 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra PD yang telah direncanakan.

Adapun Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal karena mengalami refocusing anggaran. Kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang terfokus pada Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dan Pengawasan Penanaman Modal belum terlaksana maksimal dengan capaian kinerja 86%. Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, beberapa rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang mengalami perubahan. Diantaranya ada kegiatan yang memiliki tingkat realisasi anggaran terendah yaitu Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, hal ini dikarenakan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang masuk sangat rendah, hanya 1 pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti, dari target 10 pengaduan yang ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2. 18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
1. 03.01.2. 01.	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
11 18.01.2. 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2. 18.01.2. 01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
2. 18.01.2. 01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18.01.2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	100%	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	100%
2. 18.01.2. 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	14 Bulan	28 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%
2. 18.01.2. 02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	12 Bulan	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
2. 18.01.2. 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%
2. 18.01.2. 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	-	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.01. 2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18.01. 2. 06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2. 18.01. 2. 06. 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18.01. 2. 06. 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18.01. 2. 06. 05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18.01. 2. 06. 08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Bulan	Laporan	Laporan	100%	-	-	0%
2. 18.01. 2. 06. 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18.01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18.01. 2. 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2. 18.01. 2. 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18.01. 2. 08. 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18.01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18.01. 2. 09. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	12 Bulan	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2. 18.01. 2. 09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	12 Bulan	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2. 18.01. 2. 09. 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
2. 18.01. 2. 09. 11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	12 Bulan	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-
2. 18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	45 Investor	42 Investor	40 Investor	42 Investor	105%	45 Investor	50 Investor	111%
2. 18.02. 2. 01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10 Investor	5 Kali	5 Kali	5 Kali	-	5 Kali	5 Kali	-



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.02. 2. 01. 01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	10 Investor	5 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2. 18.02. 2. 01. 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 18.02. 2. 02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2. 18.02. 2. 02. 01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	1 Dokumen Perda	1 Dokumen Perda	-	-	-	-	-	-
2. 18.02. 2. 02. 02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. 18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	6 Event	3 Event	6 Event	3 Event	60%	1 Event	0 Event	60%
2. 18.03. 2. 01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2. 18.03. 2. 01. 01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2. 18.03. 2. 01. 02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	6 Event	3 Event	6 Event	4 Event	67%	1 Event	0 Event	0%
2. 18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	91 Persen	93,40 Persen	91 Persen	90.54 Persen	99%	92 Persen	90.35 Persen	98.2%
2. 18.04. 2. 01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	650 Dokumen dan 15 pengaduan	650 Dokumen dan 15 pengaduan	650 Dokumen dan 15 pengaduan	1148 Dokumen dan 15 pengaduan	177%	650 Dokumen dan 10 pengaduan	1140 Dokumen dan 1 pengaduan	175%
2. 18.04. 2. 01. 01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku usaha	940 Dokumen	650 Dokumen	1148 Dokumen	177%	650 Dokumen	1140 Dokumen	175%
2. 18.04. 2. 01. 02.	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	1 Pengaduan	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%
2. 18.04.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	10 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2. 18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	100%	70 Persen	70 Persen	100%
2. 18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/ sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha	350 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan dan 80 BAP	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	350 pelaku usaha, 35 Kegiatan Usaha	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	-	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	-
2. 18.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal	40 Kegiatan Usaha	-	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100.0%	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100.0%
2. 18.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	350 pelaku usaha	223 pelaku usaha	350 pelaku usaha	350 pelaku usaha	100.0%	240 pelaku usaha	227 pelaku usaha	94.6%
2. 18.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal	40 kegiatan usaha	59 Kegiatan Usaha	40 kegiatan usaha	58 Kegiatan Usaha	145.0%	250 Kegiatan Usaha	355 Kegiatan Usaha	142.0%
2. 18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang Dikendalikan	80 Persen	78 Persen	78 Persen	78 Persen	100%	78 Persen	78 Persen	100%
2. 18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%
2. 18.06.2.01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan terpadu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya pedoman pada SOP tersebut, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2024, Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan standar mutu ISO tersebut, maka perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan setiap waktu sehingga diperoleh tingkat pelayanan yang prima. Sehingga dalam penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang rutin dilaksanakan oleh Ombudsman, pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dikategorikan Baik dan berada pada Zona Hijau. Hal ini dapat terlihat dari jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 1.140 izin dengan persentase izin yang terbit tepat waktu adalah 90,35%. Untuk itu diharapkan di tahun 2025 untuk menaikkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu diharapkan persentase izin yang terbit tepat waktu dapat mencapai 92%, terdapat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021		100%	100%	100%	100%	586.8%	82,34%	100%	100%	
2	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021		91%	92%	91,50%	92%	90.59%	90.35%	92%	92%	
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Persentase Peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Cakupan Pelayanan Perizinan yang ditindaklanjuti	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	87,81%	87,81%	100%	100%	
7	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Nilai hasil evaluasi AKIP	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Nilai AKIP yang diberikan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	88,9%	93,68%	100%	100%	

note : semua target (semua kolom) diisi dgn persentase (%) karena bersifat Outcome



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antar lain:

1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara difokuskan pada peningkatan nilai investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan, promosi, dan penanganan pengaduan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi**, yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya jumlah realisasi penanaman modal;
2. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
3. Kurangnya regulasi di bidang penanaman modal,
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.
 - b. Belum adanya regulasi tentang Strategi Promosi
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha, yang disebabkan oleh:



- a. Minimnya sarana dan prasarana;
- b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

2.3.2 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan di masa transisi, memuat terkait isu strategis di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan diselesaikan. Isu strategis ini telah diselaraskan dengan Isu Strategis Global, Nasional, Isu Strategis Lingkungan yang menjadi fokus pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2025 – 2045 terdapat 5 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan visinya, yaitu:

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju;
- 2) Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang;
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- 5) Intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Beberapa kondisi atau isu global telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan di Tingkat daerah, meliputi:

1. **Perubahan Iklim;** Peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang terjadi berpotensi memiliki dampak krusial pada kehidupan Masyarakat. Meningkatnya emisi CO₂ menjadi isu utama yang menjadi perhatian dunia global saat ini.
2. **Artificial Intelligence (AI);** keamanan siber Inovasi teknologi yang berkembang pesat tidak memiliki dampak positif saja, namun juga memiliki dampak negatif. Kehadiran AI berpotensi untuk menggantikan kemampuan manusia saat ini. Selain itu keberadaan hacker mengancam keamanan nasional dan kestabilan ekonomi global
3. **Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Gender;** Ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap Pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan serta



ketidaksetaraan gender masih menjadi perhatian global. Beberapa negara masih mengalami masalah kemiskinan, serta masih banyak negara yang melakukan diskriminasi terhadap gender.

4. **Ketegangan Geopolitik;** Ketegangan antara negara – negara besar, seperti AS-China dan Isu-isu, seperti penyebaran senjata nuklir dan konflik regional mempengaruhi stabilitas geopolitik global.

Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, ditetapkan 4 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Uraian Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Berdasarkan hasil analisis kondisi daerah maka isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat;** kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana anggota masyarakat memperoleh akses dan kebutuhan dasar yang memadai untuk hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, dan keamanan. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Kualitas Infrastruktur Daerah yang Tangguh dan berkelanjutan;** Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya peningkatan struktur untuk jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan pada beberapa wilayah agar lebih memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga masyarakat pada wilayah tersebut memperoleh kemudahan akan akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya.



3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);** Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Peran SDM penting dalam menggerakkan berbagai aktivitas dan menciptakan nilai tambah. Keberadaan SDM yang berkualitas akan mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.
4. **Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;** Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus diterapkan agar daerah semakin berkembang. Penerapan prinsip-prinsip, meliputi 1) transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Partisipasi Publik; 4) Keadilan; 5) Efisiensi dan Efektivitas. akan menghasilkan kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Selain isu strategis daerah, Kabupaten Tapanuli Utara juga menetapkan isu strategis tematik yaitu terkait dengan:

1. Penurunan Angka Stunting
2. Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara itu, permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tapanuli Utara adalah belum adanya Peraturan Daerah terkait kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku usaha dan investor, minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama serta potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi.** Dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal memperhatikan kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi fasilitas kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan dalam investasi dan pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.



Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha didalam pengurusan izin. Berbagai kemudahan telah diberikan, yang diharapkan dapat menstimulasi animo masyarakat didalam mengurus izin yang dibutuhkannya.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas SDM, monitoring, maupun peninjauan lapangan. Hal ini menyebabkan pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang nantinya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat perkembangan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan perizinan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Sebagai garda depan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi, serta pertumbuhan dan pengembangan potensi unggulan daerah, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara adalah:



1. Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penanaman modal yang lebih inovatif.
3. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.
5. Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat
6. Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Tapanuli Utara
7. Peningkatan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	3,316,476,384.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	2,904,920,107.00	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	52,000,000.00	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	33,719,990.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4,999,990.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	30,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	18,720,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD	65 Dokumen	2,447,065,268.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD	65 Dokumen	2,410,162,602.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2,380,015,268.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	53,050,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	52,263,200.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 dokumen Laporan Keuangan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	4,000,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	3,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	28,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	6 Dokumen	355,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	6 Dokumen	231,963,715.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	4,999,700.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	65,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	28,499,215.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	7,498,800.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	12 Paket	25,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	12 Paket	13,000,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	230,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174,966,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	9 Unit	140,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	60,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	80,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	176,411,116.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	98,545,100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	65,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	41,940,300.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	109,411,116.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	54,604,800.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	15 Unit	146,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	15 Unit	130,528,700.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	85,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	94,995,200.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	11,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	11,882,800.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	40,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	19,210,700.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	4,440,000.00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Peningkatan Jumlah Investor	45 Investor	100,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Peningkatan Jumlah Investor	50 Investor	50,000,010.00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	45,000,000.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	14,999,900.00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	45,000,000.00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	14,999,900.00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	55,000,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	35,000,110.00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	30,000,000.00	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	10,000,000.00	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25,000,110.00	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	6 Event	225,000,000.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	3 Event	54,311,800.00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	2 Dok	225,000,000.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	2 Dok	54,311,800.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3 Dok	140,000,000.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dok	39,991,600.00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dok	85,000,000.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dok	14,320,200.00	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	91,50 Persen	129,000,000.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	91,50 Persen	97,999,750.00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	12 Bulan	129,000,000.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	12 Bulan	97,999,750.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku Usaha	100,000,000.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku Usaha	72,999,850.00	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	9,000,000.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	4,999,900.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	10 Kegiatan Usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	10 Kegiatan Usaha	-	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	400,000,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	54,999,000.00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	350 pelaku usaha, 29 Kegiatan Usaha	400,000,000.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	40 Kegiatan Usaha	54,999,000.00	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	50,000,000.00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 pelaku usaha	300,000,000.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	40 kegiatan usaha	50,000,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan	80 Persen	85,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan	80 Persen	14,999,900.00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Dok	85,000,000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Dok	14,999,900.00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dok	85,000,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 Dok	14,999,900.00	
	TOTAL PAGU				4,255,476,384.00	TOTAL PAGU				3,177,230,567.00	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun stakeholder yang lain hingga saat ini belum terakomodir. Hal ini disebabkan ketersediaan dana saat ini sangat minim.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	85,497,000.00	DAK Non Fisik
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	313,491,000.00	DAK Non Fisik
3	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan</i>	170,993,000.00	DAK Non Fisik



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan investasi
2. Meningkatkan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM
4. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penerapan Standar Pelayanan yang mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau;

Kebijakan tersebut diatas akan diimplementasikan dalam bentuk surat – surat keputusan dan akan dijadikan pedoman:

1. Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
2. Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi**. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan.
3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024, Nilai realisasi investasi tahun 2024 adalah 354,07 Miliar Rupiah, realisasi nilai investasi tahun 2024 belum mencapai target Nilai Investasi tahun 2024 sebesar 430 Miliar, dengan capaian 82,34%. Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 kami menetapkan target kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
				2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	450.000.000.000
		Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	91,50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87,70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	80

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah pada OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

- Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat dan Kepala-kepala Bidang
- Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara
- Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
- Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.



Program kerja yang dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2. Kegiatan

Rumusan Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 terlampir dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota.
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.



4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
 - Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.	18.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPPTSP	100 Persen	2,904,920,107.00			100 Persen	3,275,240,567.00
1.	03.	01.	2.	01.		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	20 Dokumen	33,719,990.00			20 Dokumen	39,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPPTSP	6 Dokumen	10,000,000.00	DAU	-	6 Dokumen	12,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	2 Laporan	4,999,990.00	DAU	-	2 Laporan	7,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPPTSP	12 Laporan	18,720,000.00	DAU	-	12 Laporan	20,000,000.00
2.	18.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD	DPMPPTSP	65 Dokumen	2,410,162,602.00			65 Dokumen	2,612,668,118.00
2.	18.	01.	2.	02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	DAU	-	25 Orang/ Bulan	2,545,618,118.00
2.	18.	01.	2.	02.	0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPPTSP	50 Dokumen	52,263,200.00	DAU	-	50 Dokumen	53,050,000.00
2.	18.	01.	2.	02.	0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	DAU	-	1 dokumen Laporan Keuangan	7,000,000.00
2.	18.	01.	2.	02.	0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPPTSP	14 Laporan	4,000,000.00	DAU	-	14 Dokumen	7,000,000.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	01.	2. 06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	DPMPTSP	6 Dokumen	231,963,715.00			6 Dokumen	257,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	4,999,700.00	DAU	-	12 Paket	7,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	28,499,215.00	DAU	-	12 Paket	40,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	7,498,800.00	DAU	-	12 Paket	10,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	13,000,000.00	DAU	-	12 Paket	15,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	10 Laporan	3,000,000.00	DAU	-	10 Laporan	5,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	174,966,000.00	DAU	-	12 Laporan	180,000,000.00
2.	18.	01.	2. 07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	9 Unit	-			10 Unit	100,000,000.00
2.	18.	01.	2. 07.	0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 07.	0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 07.	0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP	-	-	DAU	-	10 Unit	100,000,000.00
2.	18.	01.	2. 07.	0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	DPMPTSP	3 Kegiatan	98,545,100.00			3 Kegiatan	119,000,000.00
2.	18.	01.	2. 08.	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	2,000,000.00	DAU	-	1 Laporan	2,000,000.00
2.	18.	01.	2. 08.	0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPMPTSP	36 Laporan	41,940,300.00	DAU	-	36 Laporan	62,000,000.00
2.	18.	01.	2. 08.	0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	54,604,800.00	DAU	-	12 Laporan	55,000,000.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	01.	2. 09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara</i>	DPMPTSP	22 Unit	130,528,700.00			22 Unit	147,572,449.00
2.	18.	01.	2. 09.	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPTSP	5 Unit	94,995,200.00	DAU	-	5 Unit	95,572,449.00
2.	18.	01.	2. 09.	0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	10 Unit	11,882,800.00	DAU	-	10 Unit	12,000,000.00
2.	18.	01.	2. 09.	0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	19,210,700.00	DAU	-	1 Unit	30,000,000.00
2.	18.	01.	2. 09.	0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	6 Unit	4,440,000.00	DAU	-	6 Unit	10,000,000.00
2.	18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	DPMPTSP	50 Investor	50,000,010.00			55 Investor	220,000,000.00
2.	18.	02.	2. 01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00			1 Dokumen	170,000,000.00
2.	18.	02.	2. 01.	0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	-	-	DAU	-	1 Perda	150,000,000.00
2.	18.	02.	2. 01.	0003.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00	DAU	-	1 Dokumen	20,000,000.00
2.	18.	02.	2. 02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara</i>	DPMPTSP	1 Dokumen	35,000,110.00			2 Dokumen	50,000,000.00
2.	18.	02.	2. 02.	0001.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	02.	2. 02.	0003.	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	DPMPTSP	1 Daerah	10,000,000.00	DAU		1 Daerah	15,000,000.00
2.	18.	02.	2. 02.	0004.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	25,000,110.00	DAU	-	1 Dokumen	35,000,000.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	DPMPTSP	3 Event	54,311,800.00			3 Event	58,788,620.00
2.	18.	03.	2. 01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	DPMPTSP	5 Dokumen	54,311,800.00			5 Dokumen	58,788,620.00
2.	18.	03.	2. 01.	0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	4 Dokumen	39,991,600.00	DAU	-	4 Dokumen	40,000,000.00
2.	18.	03.	2. 01.	0003.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	14,320,200.00	DAU	-	1 Dokumen	18,788,620.00
2.	18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	91,50 Persen	97,999,750.00			92 Persen	93,158,835.00
2.	18.	04.	2. 01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	650 Dokumen dan 6 pengaduan	97,999,750.00			650 Dokumen dan 6 pengaduan	93,158,835.00
2.	18.	04.	2. 01.	0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	-	-	DAU	-	1 Dokumen	3,158,835.00
2.	18.	04.	2. 01.	0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	650 Pelaku Usaha	72,999,850.00	DAU	-	650 Pelaku Usaha	75,000,000.00
2.	18.	04.	2. 01.	0007.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	6 Pelaku Usaha	4,999,900.00	DAU	-	6 Pelaku Usaha	5,000,000.00
2.	18.	04.	2. 01.	0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	DAU	-	20 Kegiatan Usaha	10,000,000.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	05.			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	75 Persen	54,999,000.00			80 Persen	360,000,000.00
2.	18.	05.	2. 01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	40 pelaku usaha	54,999,000.00			60 pelaku usaha	360,000,000.00
2.	18.	05.	2. 01.	0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	DAU	-	60 Kegiatan Usaha	60,000,000.00
2.	18.	05.	2. 01.	0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	-	-	-	-	350 pelaku usaha	240,000,000.00
2.	18.	05.	2. 01.	0006.	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	DAU	-	60 kegiatan usaha	60,000,000.00
2.	18.	06.			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	DPMPTSP	80 Persen	14,999,900.00			80 Persen	13,199,835.00
2.	18.	06.	2. 01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00			1 Dokumen	13,199,835.00
2.	18.	06.	2. 01.	0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00	DAU	-	1 Dokumen	13,199,835.00
					TOTAL PAGU				3,177,230,567.00		-		4,020,387,857.00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis Tahun 2025-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025. Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju 2026		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.	18.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100 Persen	2,904,920,107.00	3,275,240,567.00			
1.	03.	01.	2.	01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	20 Dokumen	33,719,990.00	39,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	01.	0001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPTSP	6 Dokumen	10,000,000.00	12,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	01.	0006. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	2 Laporan	4,999,990.00	7,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	01.	0007. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	12 Laporan	18,720,000.00	20,000,000.00	DAU		
2.	18.	01.	2.	02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD	DPMPTSP	65 Dokumen	2,410,162,602.00	2,612,668,118.00			
2.	18.	01.	2.	02.	0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	2,545,618,118.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	02.	0003. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	50 Dokumen	52,263,200.00	53,050,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	02.	0005. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	7,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	02.	0007. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	14 Laporan	4,000,000.00	7,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	DPMPTSP	6 Dokumen	231,963,715.00	257,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	06.	0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	4,999,700.00	7,000,000.00	DAU	-	



Kode						Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju 2026		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.	01.	2. 06.	0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	28,499,215.00	40,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 06.	0003.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	7,498,800.00	10,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0005.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	13,000,000.00	15,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0008.		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	3,000,000.00	5,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0009.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	174,966,000.00	180,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 07.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DPMPTSP	<i>9 Unit</i>	<i>-</i>	100,000,000.00			
2.	18.	01.	2. 07.	0002.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 07.	0005.		Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang disediakan	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 07.	0006.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP	-	-	100,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 07.	0010.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 08.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang</i>	DPMPTSP	<i>3 Kegiatan</i>	98,545,100.00	119,000,000.00			
2.	18.	01.	2. 08.	0001.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	DAU		Sekretaris
2.	18.	01.	2. 08.	0002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPMPTSP	36 Laporan	41,940,300.00	62,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 08.	0003.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	54,604,800.00	55,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 09.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara</i>	DPMPTSP	<i>22 Unit</i>	130,528,700.00	147,572,449.00			
2.	18.	01.	2. 09.	0001.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPTSP	5 Unit	94,995,200.00	95,572,449.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 09.	0006.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	10 Unit	11,882,800.00	12,000,000.00	DAU		
2.	18.	01.	2. 09.	0009.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	19,210,700.00	30,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 09.	0011.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	6 Unit	4,440,000.00	10,000,000.00	DAU	-	



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju 2026		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Peningkatan Jumlah Investor	DPMPTSP	50 Investor	50,000,010.00	220,000,000.00			
2.	18.	02.	2. 01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		<i>Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00	170,000,000.00			
2.	18.	02.	2. 01.	0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	-	-	150,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	02.	2. 01.	0003.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00	20,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	02.	2. 02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara</i>	DPMPTSP	1 Dokumen	35,000,110.00	50,000,000.00			
2.	18.	02.	2. 02.	0001.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	02.	2. 02.	0003.	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1 Daerah	10,000,000.00	15,000,000.00			
2.	18.	02.	2. 02.	0004.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	25,000,110.00	35,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Keikutsertaan pada Pameran Investasi	DPMPTSP	5 Event	54,311,800.00	58,788,620.00			
2.	18.	03.	2. 01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti</i>	DPMPTSP	5 Dokumen	54,311,800.00	58,788,620.00			
2.	18.	03.	2. 01.	0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	4 Dokumen	39,991,600.00	40,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	03.	2. 01.	0003.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	14,320,200.00	18,788,620.00	DAU	-	
2.	18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	92 Persen	97,999,750.00	93,158,835.00			
2.	18.	04.	2. 01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</i>	DPMPTSP	650 Dokumen dan 10 pengaduan	97,999,750.00	93,158,835.00			
2.	18.	04.	2. 01.	0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	-	-	3,158,835.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
2.	18.	04.	2. 01.	0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	650 Pelaku Usaha	72,999,850.00	75,000,000.00	DAU		



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmen 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai Kepmen 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju 2026		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.	04.	2. 01.	0007.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	6 Pelaku Usaha	4,999,900.00	5,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
2.	18.	04.	2. 01.	0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	10,000,000.00	DAU		
2.	18.	05.			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	70 Persen	54,999,000.00	360,000,000.00			
2.	18.	05.	2. 01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</i>	DPMPTSP	<i>50 pelaku usaha</i>	54,999,000.00	360,000,000.00			
2.	18.	05.	2. 01.	0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	60,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan, Informasi dan Pelaporan
2.	18.	05.	2. 01.	0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	-	-	240,000,000.00	DAU		
2.	18.	05.	2. 01.	0006.	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	60,000,000.00	DAU		
2.	18.	06.			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	DPMPTSP	80 Persen	14,999,900.00	13,199,835.00			
2.	18.	06.	2. 01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan</i>	DPMPTSP	<i>1 Dokumen</i>	14,999,900.00	13,199,835.00			
2.	18.	06.	2. 01.	0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	14,999,900.00	13,199,835.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
TOTAL PAGU										3,177,230,567.00	4,020,387,857.00			



BAB V

PENUTUP

RENJA-DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA-DPMPTSP Tahun 2025 – 2026 dalam menunjang tercapainya target tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

Melalui Penyusunan Renja-DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, maka penetapan prioritas Pembangunan daerah yang merupakan Upaya penjabaran tujuan, sasaran dan target DPMPTSP diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun dengan perangkat daerah lingkup luar yang membidangi fungsi tertentu.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan, kami mohon masukan dari semua pihak agar dokumen ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan berguna kedepannya.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I**

NIP. 19700718 200502 1 001



**LAMPIRAN
RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, 22411 Provinsi Sumatera Utara
Post-el perizinan@taputkab.go.id, Laman eperizinan.taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang - undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan persiapan dalam mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan, melakukan pengendalian dan penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
- b. Menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026;
- c. Menyusun Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026;
- d. Menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : Juli 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I**

NIP. 19700718 200502 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Peninggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

- I. Ketua Tim : Jonner Julifer, ST/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris Tim : Lindung L. Tobing, ST. M.Si/Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Pelaksana Administrasi : 1. Susi Radotma Hutaauruk, SE. MM/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Rungguk Pardede, SH/Analisis Keuangan
3. Siska Mariana Simanjuntak, SE/Analisis Rencana Program dan Kegiatan
- IV. Kelompok Kerja
- A. Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
- Koordinator : Ronny M.B. Hutasoit, SE/Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
- Anggota : 1. Halomoan Batubara, ST., M.Si/Perencana
2. Christian Hutagalung, SP/Perencana
3. Marlon Peron V. Sianipar, SE/Perancang Peraturan Perundang-undangan
4. Marolop Sirait, ST/Analisis Pengembangan Potensi Daerah
5. Desi Susanti Lumban Gaol, SE/Analisis Penanaman Modal
- B. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan
- Koordinator : Erwin Hasudungan Hutaauruk, SP. M.Si/Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan
- Anggota : 1. Toni Rianto Sitorus, ST/Asesor Manajemen Mutu Industri
2. Evita Bernadeta Ginting, ST/Arsiparis
3. Albert Silitonga, SH/Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
4. Kristina Sitompul, A.Md/Pengelola Data Pengembangan Investasi

C. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator : Hotmauli Parhusip, SE., MM/Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Anggota

- : 1. Juherman Amubi Purba, SE/Analisis Kebijakan
2. Tulus Pinta Raja Situmeang, ST/Analisis Kebijakan
3. Marulam Silaban, ST/Analisis Dokumen Perizinan
4. Ruth Sabrina Matondang, SH/Analisis Dokumen Perizinan
5. Susenti Lasmaria Sitorus, A.Md/Pengelola Dokumen Perizinan



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I**

NIP. 197007182005021001